

CALK
SEMESTER I
(UNAUDITED)
TA 2026

Stasiun PSDKP Pontianak

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec.
Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kubu Raya, 30 Juni 2026

Plt. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Nur Ilham S.Pi, M.H

NIP. 19850616 200701 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
JL Dr. Moh Hatta, Sui Rengas, Kec. Sui Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalbar
TELEPON (0561) 773321, FAXIMILE (0561) 773321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Unaudited Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kubu Raya, 30 Juni 2026
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Nur Ilham S.Pi, M.H
NIP. 19850616 200701 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Pontianak Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 44,00

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp17.938.114.207,00 atau mencapai 52% dari alokasi anggaran sebesar Rp 34.439.025.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.482.103.386,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.040.098.366,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35.442.005.020,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 36.482.103.386,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.019.990.411,00 sehingga terdapat Defisit

dari

Kegiatan Operasional senilai (Rp19.019.990.411,00). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp44,00 dan sebesar (Rp19.019.990.367,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp19.019.990.367,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp36.759.368.436,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp19.019.990.367,00) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0,00 Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp0,00 Koreksi lain – lain Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.938.114.163,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp35.677.492.232,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		44		2.776.624
JUMLAH PENDAPATAN		-	44	0,00	2.776.624
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	14.016.182.000	7.374.685.753		6.350.468.544
Belanja Barang	B.4	20.313.143.000	10.454.391.452		4.289.763.219
Belanja Modal	B.5	109.700.000	109.037.002		31.413.000
JUMLAH BELANJA		34.439.025.000	17.938.114.207	52,09	10.671.644.763

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2026	31/12/2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	210.000.000	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	830.098.366	709.325.711
Jumlah Aset Lancar		1.040.098.366	709.325.711
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.836.746.000	11.836.746.000
Peralatan dan Mesin	C.15	61.525.799.556	61.416.762.554
Gedung dan Bangunan	C.16	14.586.826.318	14.586.826.318
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	22.494.291.923	22.494.291.923
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(75.001.658.777)	(74.241.649.199)
Jumlah Aset Tetap		35.442.005.020	36.092.977.596
ASET LAINNYA			
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.21	-	550.385.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	550.385.000
JUMLAH ASET		36.482.103.386	37.352.688.307
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	210.000.000	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	543.558.885	593.319.871
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	51.052.269	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		804.611.154	593.319.871
JUMLAH KEWAJIBAN		804.611.154	593.319.871
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	35.677.492.232	36.759.368.436
JUMLAH EKUITAS DANA		35.677.492.232	36.759.368.436
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		36.482.103.386	37.352.688.307

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak			-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.834.563.998	6.710.896.993
Beban Persediaan	D.3	30.718.500	31.612.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.241.637.023	4.161.785.049
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	799.764.132	582.444.363
Beban Perjalanan Dinas	D.6	353.297.180	193.656.059
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	760.009.578	1.821.158.593
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		19.019.990.411	13.501.553.557
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19.019.990.411)	(13.501.553.557)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	2.775.888
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		44	736
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		44	2.776.624
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19.019.990.367)	(13.498.776.933)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(19.019.990.367)	(13.498.776.933)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	36.759.368.436	39.721.512.356
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(19.019.990.367)	(13.498.776.933)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	152.958.193
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1		-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN	E.3.5		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.6		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.7	-	152.958.193
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	17.938.114.163	10.628.827.836
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.081.876.204)	(2.716.990.904)

A. PENJELASAN UMUM

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak**

Dasar Hukum Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di amanahkan adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Pontianak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”**

Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2025 salah satu yang diamanatkan adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Disamping itu, terdapat pula arahan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
2. Pembinaan (penataan) nelayan lokal

UPT Stasiun PSDKP Pontianak melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 2 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah 5 unit yaitu Napoleon 003, Napoleon 037, Napoleon 038, TB. 01, dan *Searider*. Pembelian BBM dengan menggunakan voucher dilakukan untuk Napoleon 037 dan *searider* yang diambil di SPBU yang berada di Pontianak dan Napoleon 038 sampai dengan 30 Juni 2026 masih dalam proses pemeliharaan dan belum selesai sesuai kontrak oleh CV.KAPUAS CAHAYA BAHARI nomor SPK.963/PPK/PSDKPSta.4/PL.420/VI/2026 mulai dari tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan 26 Juli 2026 sehingga belum dapat dioperasikan.

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 69 orang yang terdiri dari Golongan IV 1 orang Golongan III sebanyak 58 orang golongan II sebanyak 10 orang, untuk tenaga PPPK Golongan IX sebanyak 11 orang,

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

golongan VII sebanyak 6 orang golongan V sebanyak 29 orang. untuk tenaga PJLP sebanyak 15 orang. dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	0	12	22	61
	KP. Hiu Macan 01	10	-	-	2	12
	KP. Hiu 11	9	-	-	3	12
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	1		-	3	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	0		-	1	1
4	Wilker PSDKP Entikong	1		0	3	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2		1	1	4
6	Satwas SDKP Sambas	3		1	3	7
7	Wilker PSDKP Singkawang	1		-	1	2
8	Wilker PSDKP Jagoibabang	0		-	1	1
9	Wilker PSDKP Selakau	1		-	1	2
10	Wilker PSDKP Sajingan	1		-	1	2
11	Satwas SDKP Kayong Utara	3		-	2	5
12	Wilker PSDKP Ketapang	4		-	-	4
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	4		1	1	6
14	Wilker PSDKP Seruyan	2		-	1	3
Total		69	0	15	46	130

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Pontianak. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Minilk Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak memiliki nomor DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2026 tanggal 02 Desember 2025 dengan nomor digital stamp 3261-4542-7322-8205. Selama Tahun Anggaran 2026, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 (empat) kali. Rincian anggaran belanja Stasiun PSDKP Pontianak 2026 adalah sebagai berikut:

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	14.124.681.000	14.016.182.000
Belanja Barang	28.620.151.000	20.297.257.000
Belanja Modal	130.000.000	125.586.000
Jumlah Belanja	42.874.832.000	34.439.025.000

- Revisi ke 1 tanggal 29 Desember 2025 dengan digital stamp DS:4349-0717-7724-1020 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global melalui automatic adjustment (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000.
- Revisi ke 2 tanggal 02 Februari 2026 dengan Digital Stamp DS:0475-8806-7007-0677 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan

melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.

- Revisi ke 3 tanggal 09 Februari 2026 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:6108-0400-3435-4250 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowering Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.
- Revisi ke 4 tanggal 23 April 2026 yang merupakan revisi DJA dengan DS:0108-9039-5045-6134 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja				
Belanja Pegawai	14.124.681.000	14.016.182.000	7.374.685.753	52,62
Belanja Barang	28.620.151.000	20.313.143.000	10.454.391.452	51,47
Belanja Modal	130.000.000	109.700.000	109.037.002	99
Jumlah Belanja	42.874.832.000	34.439.025.000	17.938.114.207	52,09

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** PN 2 memiliki **3** program prioritas, 2 kegiatan prioritas, **5** proyek prioritas, dan 5 rincian output yang tersebar **di 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Kalimantan Barat (Stasiun PSDKP Pontianak, Satwas Sambas dan Satwas Kayong Utara) dan Propinsi Kalimantan Tengah**(Satwas Kotawaringin Barat) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp16.994.760.000 dan realisasi sebesar Rp8.942.843.407 dengan rincian sebagaimana terlampir:

Kode PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian Output	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Volume	%	Satuan
	032.05.HB	2350	QHD	001	Operasi Kapal Pengawas	13.829.247.000	7.999.074.840	57,84	80	54	67,5	Hari Operasi
	032.05.HB	2350	QHD	003	Operasi Speedboat Pengawas	484.012.000	133653.050	27,61	20	5	25	Hari Operasi
	032.05.HB	2350	RCG	001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	2.365.866.000	649.456.304	27,45	7	3	42,86	Unit
	032.05.HB	2352	QIC	001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	59.013.000	50.625.000	85,79	11	17	154,55	lembaga
	032.05.HB	2352	QIC	002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	256.622.000	110.034.213	42,88	58	47	81,03	lembaga

Realisasi

Pendapatan

Rp44,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp44,00 Dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025 sebesar Rp2.776.624,00 nilai realisasi tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan per 30 Juni 2026 untuk pendapatan hanya berupa pengembalian belanja pegawai tahun yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2026	REALISASI 30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.776.624	-2776624,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	44	-	44,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain - lain	-	-	0,00
Jumlah	44	2.776.624	-100,00

Realisasi pendapatan sebesar Rp44,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp12,00 yang dibayarkan melalui SPM Nomor 00068T dengan nomor SP2D 260420000006624 tanggal SP2D 25-02-2026
- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp32,00 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00064T tanggal 20-02-2026 dan SP2D 260420000005967 tanggal 20-02-2026

B.2 Belanja

Realisasi

Belanja Negara

Rp17.938.114.207,00

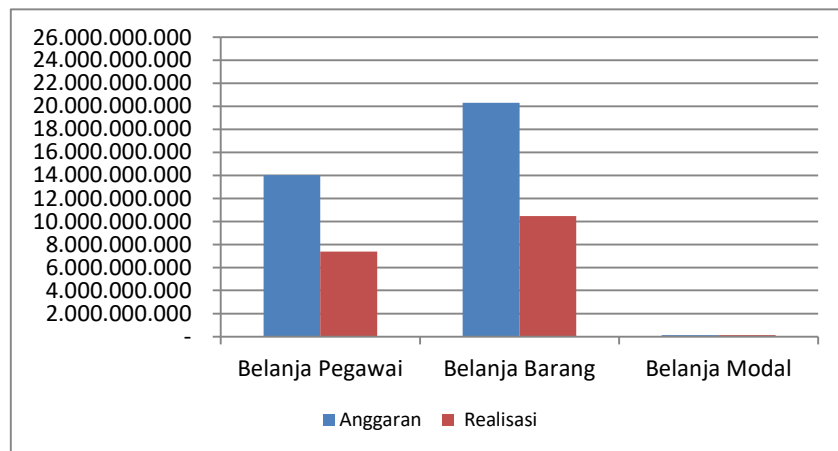
Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp17.938.114.207,00 atau 52% dari anggaran belanja sebesar Rp34.439.025.000,00 Sedangkan realisasi belanja per 30 Juni 2025 sebesar Rp10.671.644.763,00 Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni 2026 dan 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 68,09% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 30 Juni 2025.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Tahun 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.374.685.753	6.350.468.544	16,13
Belanja Barang	10.454.391.452	4.289.763.219	143,71
Belanja Modal	109.037.002	31.413.000	247,11
Total Belanja (Netto)	17.938.114.207	10.671.644.763	68,09



Belanja

Pegawai

Rp7.374.685.753

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp7.374.685.753 dan Rp6.350.468.544,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 16,13% dari 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dan kenaikan grade tunjangan kinerja beberapa pegawai Stasiun PSDKP Pontianak pada Semester I Tahun 2026.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Gaji dan Tunjangan PNS	2.525.229.651	2.635.621.694	(4,19)
Gaji dan Tunjangan PPPK	1.107.456.195	509.752.566	117,25
Uang Makan PNS	145.212.000	170.455.000	(14,81)
Uang Makan PPPK	112.721.000	37.956.000	196,98
Uang Lembur PNS	39.123.000	60.155.000	(34,96)
Uang Lembur PPPK	31.119.000	14.450.000	115,36
Tunjangan Kinerja PNS	2.443.331.393	2.441.292.782	0,08
Tunjangan Kinerja PPPK	973.703.900	480.786.151	102,52
Jumlah Belanja Netto (LRA)	7.377.896.139	6.350.469.193	16,18
Pengembalian Belanja Pegawai	3.210.386	649	-
Jumlah Belanja Bruto (Neraca)	7.374.685.753	6.350.468.544	16,13

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2025 sebesar 16,74% dikarenakan adanya kenaikan tarif pajak untuk pembayaran Gaji THR dan Tunjangan Kinerja THR pada semester I 2026 serta adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 25 orang pada bulan Oktober 2025, kenaikan kelas jabatan PNS sebanyak 12 orang.

Terdapat pengembalian belanja pegawai selama periode Januari s/d Juni 2026 sebesar Rp3.210.386,00 sebagai berikut :

- Pengembalian belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK sebesar Rp3.210.140,00 dengan NTPN AAB506QTFATOV1PE

- Pengembalian belanja pembulatan gaji pegawai PPPK sebesar Rp 31,00 dengan NTPN 062327NAV5GETDTG
- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS yang dibayar melalui potongan SPM sebesar Rp68,00 sesuai SP2D nomor 260420000031404 tanggal 23-06-2026
- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS yang dibayar melalui potongan SPM sebesar Rp15,00 sesuai SP2D nomor 260420000005866 tanggal 20-02-2026
- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS yang dibayar melalui potongan SPM sebesar Rp52,00 sesuai SP2D nomor 260420000005867 tanggal 20-02-2026
- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS yang dibayar melalui potongan SPM sebesar Rp 52,00 sesuai SP2D nomor 260420000020972 tanggal 07-05-2026
- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS yang dibayar melalui potongan SPM sebesar Rp 28,00 sesuai SP2D nomor 260420000020971 tanggal 07-05-2026

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp 10.454.391.452

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp10.454.391.452 dan Rp4.289.763.219 Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 143,71% dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal tersebut dikarenakan percepatan penyerapan realisasi belanja.

Sebagian besar belanja barang berasal dari belanja barang non operasional yaitu belanja bahan berupa bahan bakar

minyak untuk KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 711.

Selain itu terdapat belanja barang untuk operasional perkantoran antara lain berupa pembayaran langganan daya dan jasa, honor pegawai kontrak, konsumsi rapat, ATK dan komputer supplies, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	625.196.750	630.957.603	(0,91)
Belanja Barang Persediaan (5218)	8.016.751.254	2.348.249.350	241,39
Belanja Barang Non Operasional (5212)	29.064.500	17.935.500	62,05
Belanja Pemeliharaan (5231)	909.891.084	614.176.857	48,15
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	346.637.180	193.656.059	79,00
Belanja Jasa (5221)	527.336.981	484.787.850	8,78
Jumlah Belanja Netto (LRA)	10.454.877.749	4.289.763.219	143,72
Pengembalian Belanja	486.297	-	-
Total Belanja Bruto (NERACA)	10.454.391.452	4.289.763.219	143,71

Realisasi belanja barang per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 143,71% dibandingkan dengan 30 Juni 2025 dikarenakan kegiatan operasi Kapal Pengawas dan pemeliharaan-pemeliharaan gedung dan peralatan dan mesin serta kegiatan perjalanan dinas dalam angka kegiatan pengawasan dilaksanakan disemester I 2026.

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp486.297,00 berdasarkan hasil Audit Operasional dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat V Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2026 dimana terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor TA. 2026 oleh CV. Cahaya Mandiri berdasarkan SPK nomor SPK.582/PPK.STA.4/PL.420/III/2026 tanggal 30 Maret

2026. Kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Mei 2026 dengan NTPN 2C9910JV0G4K149M dan kode billing 702605265244470.

Belanja Modal

Rp109.037.002

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp109.037.002,00 dan Rp31.413.000,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada semester I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 247,11%.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	#VALUE!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.037.002	31.413.000	247,11
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin		0	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Jumlah Belanja	109.037.002	31.413.000	247,11
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	109.037.002	31.413.000	247,11

- Pembelian Kamera Udara sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp24.700.000,00
- Pembelian Tablet PC (untuk KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11) sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp28.057.002,00
- Pembelian Televisi (untuk KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11) sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp9.875.000,00

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

- Pembelian Printer sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp12.200.000,00
- Pembelian A.C. Split sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp10.635.000,00
- Pembelian P.C Unit sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp18.950.000,00
- Pembelian Mesin Cuci (untuk KP. Hiu Macan 01) sebanyak 1 (satu) unit senilai 4.620.000,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2026.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2026 dan 2025 masing – masing sebesar Rp109.037.002,00 dan Rp31.413.000,00 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal peralatan dan mesin pada semester I tahun 2026 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2026	REALISASI 30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Lap Top		31.413.000	
Kamera Udara	24.700.000		
Tablet PC	28.057.002		#DIV/0!
Televisi	9.875.000		
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12.200.000		
A.C. Split	10.635.000		#DIV/0!
P.C Unit	18.950.000		
Mesin Cuci	4.620.000		#DIV/0!
Jumlah Belanja	109.037.002	31.413.000	247,11
Pengembalian	0	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5.1. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi belanja modal penambahan nilai jaringan pada 30 Juni 2026 dan 2025 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2026 dan 2025.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada 30 Juni 2026 dan 2025 tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp210.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp210.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Uang Tunai di Brankas	6.946.500	-
Uang di Rekening Bank	22.361.781	-
Uang Muka (Voucher)	116.000.000	-
Saldo BPP	13.639.378	-
Kwitansi UP yang belum di SPMkan	51.052.269	-
Sub Total I	209.999.928	-
BP LS-Bendahara		
Sub Total II	-	-
Jumlah (Sub Total I - II)	209.999.928	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	210.000.000	-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	(72)	-

Terdapat selisih antara saldo pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada neraca sebesar Rp72,00 dikarenakan tidak ada pecahan uang kecil untuk uang tunai yang ada didalam berankas.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per

tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 dan Rp0.

*Piutang PNB
Rp0*

C.4 Piutang PNB

Tidak terdapat saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan Rp0

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp0

*Beban Dibayar
di Muka Rp0*

C.9 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Pendapatan C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Rp 0

Persediaan C.11 Persediaan

Rp830.098.366 Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp830.098.366,00 dan Rp709.325.711,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 Juni 2026	30 Desember 2025
Barang Konsumsi	10.034.750	11.398.750
Suku Cadang	820.063.616	697.926.961
Jumlah	830.098.366	709.325.711

Rincian mutasi transaksi persediaan pada modul pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2026 (Saldo Awal 2026)	709.325.711
Realisasi Belanja 521811 30 Juni 2026	29.354.500
Realisasi Belanja 523123 30 Juni 2026	295.971.102
Total Realisasi Juni 2026	325.325.602
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan	0
Total	0
Saldo Awal + Total Realisasi + Total	1.034.651.313
Beban Persediaan Konsumsi	30.718.500
Beban Persediaan Suku Cadang	173.834.447
Total Beban	204.552.947
Selisih	830.098.366
Neraca 30 Juni 2026	830.098.366
Selisih	0

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2026	709.325.711
MUTASI TAMBAH	
TOTAL PEMBELIAN (pada SAKTI modul PERSEDIAAN)	325.325.602
TOTAL MUTASI TAMBAH	325.325.602
MUTASI KURANG	
BEBAN PERSEDIAAN (pada LO)	204.552.947
TOTAL MUTASI KURANG	204.552.947
SALDO AKHIR PADA 30 Juni 2026	830.098.366

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2026	709.325.711
MUTASI TAMBAH	
M02 Pembelian	325.325.602
TOTAL MUTASI TAMBAH	325.325.602
MUTASI KURANG	
K01 Habis Pakai	204.552.947
TOTAL MUTASI KURANG	204.552.947
SALDO AKHIR PADA 30 JUNI 2026	830.098.366

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp325.325.602 merupakan transaksi pembelian dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp29.354.500
- Suku cadang sebesar Rp 295.971.102

Mutasi kurang persediaan sebesar Rp204.552.947 berupa transaksi habis pakai dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp30.718.500
- Suku Cadang sebesar Rp173.834.447

Rincian persediaan periode 30 Juni 2026 adalah:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Kode	Uraian	Nilai
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	1.162.000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	745.000
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	36.000
1.01.03.01.005	Buku Tulis	99.750
1.01.03.01.007	Penggaris	18.000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	129.000
1.01.03.01.012	Staples	35.000
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	127.500
1.01.03.02.001	Kertas HVS	3.870.500
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	203.000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	3.609.000
JUMLAH BARANG KONSUMSI		10.034.750
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	820.063.616
JUMLAH SUKU CADANG		820.063.616
TOTAL		830.098.366

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor : 226/PSDKPSta.4/PL.760/VI/2026 tanggal 30 Juni 2025. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp 10.034.750 terdiri dari Alat Tulis, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Penggaris, Alat Perekat, Staples, Alat Tulis Kantor Lainnya, Kertas HVS, Berbagai Kertas, Tinta/Toner Printer. Persediaan suku cadang sebesar Rp 820.063.616 yang merupakan Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor dimana suku cadang tersebut merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu Macan 01, Hiu 11, Speedboat Pengawas, Rigid Inflatable Boat dan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak yang masih ada tahun 2026.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

<i>Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-.
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0</i>	C.13 Tagihan Penjualan Angsuran Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2026.
<i>Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0</i>	C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
<i>Tanah Rp11.836.746.000</i>	C.15 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2026 adalah sebesar Rp11.836.746.000 dan Rp11.836.746.000 dengan mutasi sebesar Rp 0. Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Per Tanggal 30 Juni 2026

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	44.908	Jl. Dr. M. Hatta, Kubu Raya, Kalimantan Barat	10.543.141.000
2	552	Jl. Malindo, Entikong, Kalimantan Barat	412.867.000
3	934	Jl. Hayam Wuruk, Ketapang, Kalimantan Barat	475.509.000
4	3.431	Jl. Swadaya, Waringin Barat, Kalimantan Tengah	405.229.000
Jumlah			11.836.746.000

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp61.525.799.556,00 dan Rp61.416.762.554,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp109.037.002,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Peralatan dan
Mesin
Rp61.525.799.556*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	61.416.762.554
Mutasi tambah:	
Pembelian	109.037.002
Transfer masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Perolehan lainnya	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2026	61.525.799.556
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(60.515.892.600)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.009.906.956

Mutasi tambah nilai peralatan dan mesin sebesar Rp109.037.002 diperoleh dari:

- Pembelian Kamera Udara sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp24.700.000,00
- Pembelian Tablet PC (untuk KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11) sebanyak 2 (dua) unit senilai

Rp28.057.002,00

- Pembelian Televisi (untuk KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11) sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp9.875.000,00
- Pembelian Printer sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp12.200.000,00
- Pembelian A.C. Split sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp10.635.000,00
- Pembelian P.C Unit sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp18.950.000,00
- Pembelian Mesin Cuci (untuk KP. Hiu Macan 01) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.620.000,00

Gedung dan

Bangunan

Rp14.586.826.318

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp 14.586.826.318 dan Rp 14.402.001.836. Mutasi tambah sebesar Rp0,00 tidak terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 30 Juni 2026. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	14.586.826.318
Mutasi tambah:	
•Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Transaksi normalisasi BMN	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	14.586.826.318
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(2.783.170.630)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	11.803.655.688

Jalan, Jaringan

dan Irigasi

Rp22.494.291.923

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp22.494.291.923 dan Rp22.494.291.923,00. Mutasi saldo jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	22.494.291.923
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	22.494.291.923
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(11.435.975.602)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	11.058.316.321

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp550.385.000,00. Tidak terdapat mutasi saldo pada Aset Tetap Lainnya

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak terdapat mutasi saldo KDP per 30 Juni 2026.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp75.001.658.777,
00*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing – masing Rp75.001.658.777.00 dan Rp74.241.649.199,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	61.525.799.556	-60.515.892.600	1.009.906.956
2	Gedung dan Bangunan	14.586.826.318	-2.783.170.630	11.803.655.688
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.494.291.923	(11.702.595.547)	10.791.696.376
4	Aset Tetap Lainnya	-	0	0
Akumulasi Penyusutan		98.606.917.797	-75.001.658.777	23.605.259.020

Aset Tak

Berwujud Rp0

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain

Rp0

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp.0

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp0

C.24 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi tersebut berasal dari akumulasi aset tak berwujud dan aset lain – lain.

Uang Muka dari

KPPN

Rp210.000.000

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp210.000.000,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Persediaan yang diajukan ke KPPN sebesar Rp0 dan TUP sebesar Rp0

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp543.558.885*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp543.558.885,00 dan Rp593.319.871,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan SPM yang diterbitkan dibulan Juni 2026 tetapi SP2D diterbitkan dibulan Juli 2026. Rincian utang kepada pihak ketiga sebesar Rp543.558.885,00 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai
Perjalanan Dinas Biasa	00321T	29/06/2026	260420000032676	01/07/2026	5.300.000
Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2026	00312T	22/06/2026	260420000031405	01/07/2026	26.457.600
Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2026	00313T	22/06/2026	260420000031406	01/07/2026	51.923.040
Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2026	00300T	12/06/2026	260420000029439	01/07/2026	57.465.866
Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2026	00299T	12/06/2026	260420000029440	01/07/2026	87.696.807
Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2026	00287T	09/06/2026	260420000028292	01/07/2026	116.342.101
Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2026	00286T	09/06/2026	260420000028651	01/07/2026	198.373.471
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga s.d 30 Juni 2026					543.558.885

*Utang yang
belum Diterima
Tagihannya
Rp51.052.269,00*

C.27 Utang yang belum diterima tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp51.052.269,00 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan kwitansi yang telah dibayar menggunakan uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan per 30 Juni 2026.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp.0 dan Rp0.

*Ekuitas
Rp35.677.492.232,
00*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35.677.492.232,00 dan Rp36.759.368.436,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Pegawai
Rp7.834.563.998*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp7.834.563.998,00 dan Rp6.710.896.993,00 Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	3.281.968.591	2.819.309.800	16,41
Beban Pembulatan Gaji	51.751	43.807	18,13
Beban Tunjangan-Tunjangan	4.224.368.656	3.608.527.386	17,07
Beban Uang Makan	257.933.000	208.411.000	23,76
Beban Lembur	70.242.000	74.605.000	- 5,85
Jumlah Beban Pegawai (LO)	7.834.563.998	6.710.896.993	16,74
Belanja Pegawai Tahun yang Lalu			#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.210.386)		#DIV/0!
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(459.878.245)	(549.218.555)	-
Jumlah Beban Pegawai (Neraca)	7.371.475.367	6.161.678.438	19,63

Beban Pegawai per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2025 sebesar 16,74% dikarenakan adanya kenaikan tarif pajak untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja THR pada semester I 2026 serta adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 25 orang, kenaikan kelas jabatan PNS sebanyak 12 orang.

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp3.210.386,00 merupakan kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK dikarenakan kelebihan pembayara gaji PPPK bulan Juni 2026 atas nama M. Yusuf NIP PPPK 199111272025211068 yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan mengundurkan diri atas permintaan sendiri per 01 Juni 2026 sesuai KEPMEN KP NOMOR 089/MEN-KP/KP.840/V/2026 tanggal 18 Mei 2026. Kelebihan pembayaran gaji PPPK bulan Juni 2026 tersebut telah

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

disetorkan oleh yang bersangkutan pada tanggal 08 Juni 2026 dengan NTPN AAB506QTFATOV1PE senilai Rp3.210.140,00 dan NTPN 062327NAV5GETDTG dengan nilai Rp31,00 pada tanggal 09 Juni 2026.

Sedangkan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 30 Juni 2026 sebesar Rp459.878.245,00 merupakan Gaji/Tunjangan PNS dan PPPK bulan Juli dimana SPM gaji tersebut diterbitkan pada bulan juni akan tetapi SP2D diterbitkan per 1 Juli 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai
Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2026	00300T	12/06/2026	260420000029439	01/07/2026	57.465.866
Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2026	00299T	12/06/2026	260420000029440	01/07/2026	87.696.807
Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2026	00287T	09/06/2026	260420000028292	01/07/2026	116.342.101
Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2026	00286T	09/06/2026	260420000028651	01/07/2026	198.373.471
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga s.d 30 Juni 2026					459.878.245

Beban

Persediaan

Rp30.718.500,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp30.718.500,00 dan Rp31.612.500,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	30.718.500	31.612.500	(2,83)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	30.718.500	31.612.500	(2,83)

Rincian Beban Persediaan sebesar Rp30.718.500,00 adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Saldo Persediaan s.d 30 Juni 2026	30.718.500
Bahan Komputer	20.004.500
Beban ATK	9.350.000
Beban Persediaan Pemakaian Saldo Awal 01 Januari 2026	1.364.000

*Beban Barang
dan Jasa
Rp9.241.637.023*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp9.241.637.023,00 dan Rp4.161.785.049,00 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	596.723.038	583.206.294	2,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	78.808.500	81.201.089	-2,95
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.104.000	2.146.000	-48,56
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.700.000	39.150.000	-11,37
Beban Bahan	7.457.984.350	2.267.931.410	228,85
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	568.508.904	743.197.980	-23,51
Beban Barang Operasional Lainnya	6.922.999	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa	286.868.232	252.287.776	13,71
Beban Sewa	162.962.000	169.352.000	-3,77
Beban Jasa Lainnya	47.055.000	23.312.500	101,84
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	9.241.637.023	4.161.785.049	122,06
Pembayaran Beban Tahun Lalu		56.643.787	-100,00
Pengembalian Belanja		8.061.700	
Ralat SPM			#DIV/0!
Belanja barang yang masih harus dibayar	(78.380.640)	(39.835.574)	96,76
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	9.163.256.383	4.178.593.262	119,29

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Penjelasan beban belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Beban Keperluan Perkantoran Per 30 Juni 2026	596.723.038
Honorarium dan THR Petugas Kebersihan	70.813.920
Honorarium dan THR Pramubakti	23.604.640
Honorarium dan THR Pengemudi Operasional	23.604.640
Honorarium dan THR Tenaga Keamanan	188.837.120
Honorarium PPPK Paruh Waktu	26.457.600
Honorarium dan THR PJLP Tenaga Keamanan Kalteng	28.173.280
Honorarium dan THR PPPK Paruh Wakt	156.288.000
Biaya Kebutuhan Dasar Perkantoran Di Dalam Negeri	39.775.447
Honorarium dan THR Content Creator	23.604.640
Jamuan Tamu	7.344.551
Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan	8.219.200

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Per 30 Juni 2026	78.808.500
Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh awak Kapal Pengawas	78.808.500

Beban Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Per 30 Juni 2026	1.104.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.104.000

Beban Bahan Per 30 Juni 2026	7.457.984.350
Pelumas	69.050.000
Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas	7.050.132.000
Air Bersih	20.270.000
Belanja Bahan Makanan AKP (Natura)	207.471.000
Bahan Bakar Minyak Operas Speed	99.368.050
Pelumas	2.360.000
Biaya konsumsi Rapat	7.641.300
Biaya penanganan barang hasil pengawasan	803000
Papan Larangan/ Perlengkapan Penyegehan	889.000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Beban Barang Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026	568.508.904
Uang Jaga Sandar Kapal Pengawas	63.310.300
Biaya Delegasi KP	354.077.000
Pengadaan Seragam PDL Lengan Panjang	103.523.040
Biaya Delegasi Personil Onboard	32.345.000
Uang Makan	7.955.000
Pembelian Lisensi Aplikasi Zoom, Google Drive	7.298.564

Beban Barang Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026	6.922.999
Pengiriman Barang	4.000.000
Media Informas	2.922.999

Beban Langganan Daya dan Jasa Per 30 Juni 2026	1.126.936.232
Langganan Listrik	229.120.596
Langganan Telepon	53.174.336
Langganan Air	4.573.300

Beban Sewa Per 30 Juni 2026	162.962.000
Sewa Kantor	162.962.000

Beban Jasa Lainnya Per 30 Juni 2026	47.055.000
Ongkos Angkut BBM	45.005.000
Biaya Sertifikasi SDM Kearsipan	2.050.000

Beban Barang dan jasa yang masih harus dibayar per 30 Juni 2026 sebesar Rp78.380.640,00 merupakan gaji PJLP bulan Juni yang telah diterbikat SPM akan tetapi SP2D diterbitkan tang 1 Juli 2026.

Beban

Pemeliharaan

Rp799.764.132

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp799.764.132,00 dan Rp582.444.363,00 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.789.727	5.931.004	96,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	432.971.578	471.265.309	- 8,84
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.168.380	2.799.414	69,47
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	758.023	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang	173.834.447	101.690.613	41,50
Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)	799.764.132	582.444.363	37,31
Utang yang belum ditagihkan			
Utang kepada pihak ketiga			
Pengembalian Belanja Pemeliharaan	- 486.297		
Jumlah Beban Pemeliharaan (NERACA)	799.277.835	582.444.363	37,23

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp486.297,00 berdasarkan Hasil Audit Operasional pada Stasiun PSDKP Pontianak Nomor : T.866/ITJ.5/HP.130/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang dilaksanakan oleh Inspektorat V Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2026 dimana terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor TA. 2026 oleh CV. Cahaya Mandiri berdasarkan SPK nomor SPK.582/PPK.STA.4/PL.420/III/2026 tanggal 30 Maret 2026. Kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Mei 2026 dengan NTPN 2C9910JV0G4K149M dan kode billing 702605265244470.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp353.297.180*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp353.297.180,00 dan Rp193.656.059,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	335.997.180	168.346.231	49,90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.300.000	9.450.000	45,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	15.859.828	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	353.297.180	193.656.059	45,19
Pengembalian belanja			#DIV/0!
Utang yang belum ditagihkan			#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (NERACA)	353.297.180	193.656.059	45,19

Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas di LO dan Neraca.

Beban perjalanan dinas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 45,19% dibandingkan dengan 2025 dikarenakan perjalanan dinas terkait kegiatan pengawasan dilaksanakan disemester I 2026.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 2025.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2026 dan 2025.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp760.009.578,0
0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp760.009.578,00 dan Rp1.821.158.593,00 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.720.515	1.376.075.825	- 316,08
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.669.118	162.669.118	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	266.619.945	282.413.650	- 5,92
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	760.009.578	1.821.158.593	- 139,62

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp44,00*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Nilai kegiatan non operasional sebesar Rp44,00 diperoleh dari:

a. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp44,00 yang diperoleh dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp12,00 yang dibayarkan melalui SPM Nomor 00068T dengan nomor SP2D 260420000006624 tanggal SP2D 25-02-2026
- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Tahun Anggaran Yang Lalu Rp32,00 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00064T tanggal 20-02-2026 dan SP2D 260420000005967 tanggal 20-02-2026

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	TH 2026	TH 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		2.775.888	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset		0	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	0	2.775.888	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	44	736	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	44	736	-94,02
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Kerugian Pelepasan Aset		0	#DIV/0!
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	44	2.776.624	-100,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp36.759.368.436

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp36.759.368.436,00 dan Rp39.721.512.356,00

Defisit LO

(Rp19.019.990.367)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar (Rp19.019.990.367,00) dan (Rp13.498.776.933,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 30 Juni 2026 dan 2025.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Barang yang dilakukan reklasifikasi semula berupa aset

tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan inventarisasi dapat disimpulkan bahwa BMN tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai aset tetap sebab tergolong barang habis pakai yang telah digunakan sejak BMN tersebut diperoleh, dengan nilai perolehan <Rp1.000.000. Koreksi reklasifikasi periode 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp0 dan Rp0

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp0.

Koreksi Nilai

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp0,00*

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp152.958.193,00 Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain LPE

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp0 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp17.938.114.163,*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar

00

Rp17.938.114.163,00 dan Rp10.628.827.836,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	44
Ditagihkan ke Entitas Lain	(17.938.114.207)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	(17.938.114.163)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026 dan 2025, DDEL sebesar Rp44,00 dan Rp2.776.624,00 sedangkan DKEL sebesar Rp17.938.114.207,00 dan Rp10.671.644.763,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Keluar dengan nilai buku sebesar Rp.0,00. Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk/transfer keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Ekuitas Akhir

Rp35.677.492.232,0

0

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35.677.492.232,00 dan Rp37.004.521.452,00

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 30 Juni 2026 pada Stasiun PSDKP Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP 12/PA/2025 24 Maret 2025 Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terjadi penggantian KPA dari semula Bayu Yuniarto Suharto S.St.Pi., M.Si., S.St.Pi menjadi Nur Ilham S.Pi, M.H. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP.14/PA/2026 tanggal 15 Juni 2026.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PA-KPA/PSDKPSta.4 /KU.110/I/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu:
 - PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
 - PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md
- Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Achmad Rohmaddun, S.Pi sesuai dengan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

Nomor 27/PSDKPSta.4/KU.110/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

2. Pada semester I tahun 2026 telah dilakukan Audit Operasional oleh Inspektorat V Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai SPT Nomor B.521/ITJ.5/KP.440/IV/2026 tanggal 23 April 2026. Dari hasil audit tersebut terdapat beberapa temuan dan sudah ditindaklanjuti. Sesuai Hasil Audit Operasional pada Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2005-2006 nomor T.866/ITJ.5/HP.130/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 sebagai berikut:

No	Hasil Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut (Link Dokumen)
1	Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak Belum Akuntabel	1) Melakukan perbaikan peran Pegawai dalam MPH Tahun 2026 dengan melakukan cascading dari Atasan Langsung;	https://drive.google.com/drive/folders/1a3GVPnwFR00Opz6mq0v0t6VTZFYPEQ82?usp=sharing
		2) Menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Urusan Umum untuk melakukan pemantauan secara berkala terkait pengisian target dan realisasi SKP Tahun 2026.	https://drive.google.com/file/d/1BQfZkLBq_88c5wCLDiB6gErV5uYUYjs7/view?usp=sharing
2	Perencanaan Kebutuhan Pengisian Jabatan Belum Dilakukan secara Memadai	1) Berkoordinasi secara tertulis dengan Sekretaris PSDKP untuk:	
		a) Melaporkan kondisi SDM terkini sesuai dengan analisa beban kerja serta permohonan untuk pemenuhan kekurangan SDM	https://drive.google.com/drive/folders/1mHEAK_o1BAIGJFACbEINcW5OYnyQHMH3?usp=sharing

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

		pada jenjang jabatan yang strategis;	
		b) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.	https://drive.google.com/drive/folders/1mq35N5o-wksgloZ9yWfWn312cpb_01wg?usp=sharing
		2) Melakukan inventarisasi dan prioritas pengisian jabatan sesuai kebutuhan operasional.	https://drive.google.com/drive/folders/1Jgm5mSBuuDp2ktUiwVHJpwyu31oSJErM?usp=sharing
3	Pelayanan Publik pada Stasiun PSDKP Pontianak Tidak Sesuai dengan Ketentuan	1) Petugas pelayanan publik untuk melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan dan mempedomani Juknis serta SOP pengawasan kapal perikanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1pGyMBBXhcExl0IlduJdnxrNzaK5-ky_s?usp=drive_link
		2) Penanggung Jawab Pelayanan Publik untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala dengan:	https://drive.google.com/drive/folders/1XofsD_WAypxlSXmXEIYG9jVL-075r-mK?usp=drive_link
		a) Membandingkan realisasi pelaksanaan komponen standar pelayanan dengan komponen standar pelayanan yang ditetapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1XofsD_WAypxlSXmXEIYG9jVL-075r-mK?usp=drive_link
		b) Memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1XofsD_WAypxlSXmXEIYG9jVL-075r-mK?usp=drive_link
		c) Menyusun strategi atau rencana aksi perbaikan atas komponen standar	https://drive.google.com/drive/folders/1XofsD_WAypxlSXmXEIYG9j

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

		pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai standar.	VL-075r-mK?usp=drive_link
		d) Melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Kepala Stasiun PSDKP Pontianak.	https://drive.google.com/drive/folders/1XofsD_WAypxlSXmXEIYG9jVL-075r-mK?usp=drive_link
4	Penanganan Barang Bukti/Barang Rampasan Berupa 11 Unit Kapal Perikanan Pasca Putusan Pengadilan Belum Efektif	3) Berkoordinasi secara tertulis dengan: a) Sekretaris Ditjen PSDKP dan Sekretaris BPPSDMKP untuk melaporkan kondisi terkini barang bukti yang berada di kolam Stasiun PSDKP Pontianak dan konfirmasi terkait dengan rencana pelaksanaan eksekusi kapal yang telah dihibahkan kepada KKP dan BPPSDMKP sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal;	https://drive.google.com/drive/folders/1cq3xMk5GUMZ79fiHErJNZNIJVTh9uPbR?usp=sharing
		b) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk percepatan pelaksanaan eksekusi dan pengeluaran barang bukti apabila telah dilakukan serah terima barang secara fisik antara negara dengan penerima hibah.	https://drive.google.com/drive/folders/1wFLDk-lliTr5cp2UJfUFd6-yV3Q03003?usp=sharing
		2) Melengkapi barang bukti yang dititipkan dengan Berita Acara Penerimaan Penitipan (Formulir BA-32 Juknis Penyidikan) dan	https://drive.google.com/drive/folders/17kQk8q-hZLSwb81F_WgFB9YhbfK26nDZ

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

		dicatat dalam buku register.	
5	Kegiatan Repowering Kapal Pengawas Napoleon 038 Belum Efektif dan Sesuai Ketentuan	1) Berkoordinasi dengan Penyedia supaya memberikan garansi penuh berupa penggantian barang dengan spesifikasi yang identik apabila nanti ditemukan terdapat cacat mutu pada barang yang sudah dibeli tanpa tambahan biaya apapun;	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/17mRE3p5yvrGasVISfwpV5wE43ubeVuNn
		2) Menyusun identifikasi kebutuhan dan perencanaan anggaran perbaikan kapal dan apabila mengalami kekurangan melakukan realokasi anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1W0-IygywX4z_IntdFYiylou3iT-BfZMH
6	Terdapat BMN Berupa Bangunan Garasi Parkir yang Sudah Tidak Dimanfaatkan	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Stasiun PSDKP Pontianak selaku KPB agar menginstruksikan secara tertulis kepada Petugas BMN supaya melakukan inventarisasi kondisi BMN yang ada untuk selanjutnya diusulkan proses penghapusan ke Sekretariat Ditjen PSDKP untuk BMN yang sudah tidak digunakan dan/atau rusak berat.	https://drive.google.com/drive/folders/172hmKB3BaKm4XukCF7rFT4_tIS0z2QIQ?usp=sharing
7	Terdapat Peralatan Pendukung Keselamatan Kerja Berupa Alat	1) Segera melakukan penjadwalan pemeliharaan BMN terhadap 8 (delapan)	https://drive.google.com/drive/folders/1UGnwUmUtWG7CNYtVxec

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

	Pemadam Api Ringan (APAR) yang Sudah Tidak Layak Pakai	unit APAR yang telah kadaluarsa melalui pengisian ulang (refill) menggunakan vendor yang tersertifikasi;	ez45ObZtW-xwL
		2) Membuat Kartu Kendali Pemeriksaan yang digantungkan pada setiap tabung APAR dan diperiksa secara berkala;	https://drive.google.com/drive/folders/1lcmcDr6jdht8wsEx8yQVFW7WjlkOyePs
		3) Menyelenggarakan pelatihan/simulasi penanggulangan kebakaran bagi pegawai kantor agar memahami cara penggunaan APAR yang benar;	https://drive.google.com/drive/folders/1m-7cuTma3o9S_V83J5MgTMsZUGI6ttj9?usp=sharing
		4) Mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin sarana prasarana pendukung K3.	https://drive.google.com/drive/folders/1Odjr9ofUPU1Dv26ohv-GltX7yxKuGoDp?usp=sharing
8	Pengamanan Kendaraan Operasional Kantor pada Satwas SDKP Sambas Tidak Memadai	1) Melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui kronologis serta mengetahui pihak-pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya BPKB tersebut sebagai bahan pertimbangan pengenaan ganti rugi apabila ditemukan adanya unsur kelalaian;	https://drive.google.com/drive/folders/1xyE8Yo1dfNqblQGA8FjtVi3J0-xHNglA
		2) Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat guna pengurusan penerbitan BPKB duplikat;	https://drive.google.com/drive/folders/1JpwM35jHPuVDcgBq6xhcU8BNoStPyIsm?usp=sharing
		3) Melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan kendaraan bermotor	https://drive.google.com/drive/folders/101cA5LPgBiHHzrMlJGtyxHCvF3FWx9vdn?usp=sharing

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

		secara tertib.	p=sharing
9	Terdapat Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Tidak Sesuai Kontrak	1) Memberikan teguran kepada PPK atas kelalaiannya dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor yang tidak sesuai dengan SPK yang telah disepakati;	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1g7i8yi8vrsmEf5pwEd2mzwidzsI5mhK0
		2) Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV Cahaya Mandiri senilai Rp486.296,85 untuk disetor ke Kas Negara.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RaHz5b5ps6ARUF8RrdFD4rUvR5lcBtjZ
	Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan		
1	Penugasan dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	a) Menginstruksikan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat rencana kegiatan dari masing-masing BPP yang menjadi dasar pengajuan UP serta membuat tanda terima UP kepada BPP	https://drive.google.com/drive/folders/1YHqU-r4Gwh43781z6zEEPJI8bLiwpaW3?usp=sharing
		b) Membuat SOP Pengelolaan atau distribusi keuangan dari KPA kepada BPP dan penerima hak pembayaran secara tunai.	

2. Pelaksanaan revisi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebanyak 4 (empat) kali dengan digital stamp DIPA SP DIPA- SP DIPA032.05.2.440847/2026 tanggal 01 Desember 2025 dengan nomor digital stamp DS:0902-5681-6761-9348 yaitu:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

- Revisi ke 1 tanggal 29 Desember 2025 dengan digital stamp DS:4349-0717-7724-1020 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa penajaman belanja K/L blokir sesuai direktif presiden sebesar Rp8.248.261.000, sehingga pagu Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026 menjadi Rp34.626.571.000 yang semula adalah Rp42.874.832.000
 - Revisi ke 2 tanggal 02 Februari 2026 dengan Digital Stamp DS:0475-8806-7007-0677 yang merupakan revisi DJA berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka pergeseran dalam satu Rincian Outout dalam satu KRO.
 - Revisi ke 3 tanggal 09 Februari 2026 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:6108-0400-3435-4250 berupa Revisi ke 2 tanggal 02 Februari 2026 dengan Digital Stamp DS:0475-8806-7007-0677 yang merupakan revisi DJA berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
 - Revisi ke 4 tanggal 23 April 2026 yang merupakan revisi DJA dengan DS:0108-9039-5045-6134 berupa penajaman belanja K/L blokir sesuai direktif presiden sebesar Rp187.546.000, sehingga pagu Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026 menjadi Rp34.439.025.000 yang semula adalah Rp36.626.571.000
3. Terdapat saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Tahun 2025 yang dibayarkan di tahun 2026. SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2025 dengan nomor SPM 00005A/440847/2025 tanggal 02 Januari 2026 dan SP2D nomor dengan nomor SP2D 269991302000326 sebesar Rp550.385.000 yang merupakan belanja dengan uraian SPM Pembayaran Perjanjian Jual Beli BBM PT.Pertamina Patra Niaga Pada Stasiun PSDKP Pontianak TA. 2025 sesuai BAST.980/PPK.Sta.4/XII/2025 Tanggal 29-12-2025 untuk itu Per 31 Desember 2025, terdapat saldo Dana di Rekening

Penampungan K/L (Akun 163139) sebesar Rp550.385.000. Saldo tersebut merupakan dana atas pekerjaan Perjanjian Jual Beli BBM PT.Pertamina Patra Niaga Pada Stasiun PSDKP Pontianak TA. 2025 yang telah diterbitkan SPM-Penampungan namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga hingga akhir tahun anggaran karena pekerjaan belum selesai 100%. "Atas saldo tersebut, telah dilakukan pelunasan/pembayaran kepada penyedia jasa pada tanggal 02 Januari 2026 dengan SP2D Nomor [269991302000326], sehingga pada periode Januari 2026 saldo akun tersebut telah nihil."

4. Berdasarkan Berita Acara Sisa Bahan Bakar Minyak Akhir Bulan Juni 2026 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 139/Sta.4-HMC.01/PW.430/VI/2026, tanggal 30 Juni 2026 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 13.700 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 713/Sta.4-HIU.11/PW.431/VI/2026, tanggal 30 Juni 2026 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 12.150 liter. Pagu anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sebesar Rp11.495.534.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sampai dengan 30 Juni 2026 sebanyak 313.000 liter dengan nilai Rp7.358.469.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp7.049.164.000,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang telah terbayarkan dan Rp309.305.000,00 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang masih belum terbayarkan.
5. Berdasarkan Berita Acara Sisa Minyak Pelumas Akhir Bulan September 2025 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 319/Sta.4-HMC.01/PW.430/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Minyak Pelumas M/E, A/E, Gearbox SAE 10W-40 sebanyak 124 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik SAE 10

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2026

sebanyak 138 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 941/Sta.4-HIU.11/PW.431/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Minyak Pelumas M/E dan A/E SAE 10W-40 sebanyak 163 liter, Minyak Pelumas Gearbox SAE 30 sebanyak 94 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik SAE 10 sebanyak 50 liter.

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Jumlah BBM Awal (liter)	Jumlah Pengisian BBM (liter)	Jumlah Pemakaian BBM (liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM (liter)
a	b	c	d	e	f	g	h = d + e - f
Hiu 11	Januari	31-12-25	11,600	-	1,050	31-01-26	10,550
	Februari	31-01-26	10,550	12,000	17,400	01-03-26	5,150
	Maret	01-03-26	5,150	28,000	27,350	31-03-26	5,800
	April	31-03-26	5,800	27,000	20,950	30-04-26	11,850
	Mei	30-04-26	11,850	27,000	32,400	31-05-26	6,450
	Juni	31-05-26	6,450	13,000	7,300	30-06-26	12,150
Hiu Macan 01	Januari	31-12-25	23,000	-	500	31-01-26	22,500
	Februari	31-01-26	22,500	20,000	37,800	01-03-26	4,700
	Maret	01-03-26	4,700	68,000	44,700	31-03-26	28,000
	April	31-03-26	28,000	55,000	71,000	30-04-26	12,000
	Mei	30-04-26	12,000	63,000	60,650	31-05-26	14,350
	Juni	31-05-26	14,350	-	650	30-06-26	13,700

3. Sampai dengan saat ini 30 juni 2025 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp44,00 dengan rincian:

- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp12,00 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00068T tanggal 24 Februari 2026 dan sebesar Rp32,00 nomor SPM 00064T tanggal 20 Februari 2026

4. Sampai dengan 30 Juni 2026 masih terdapat bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung IMB tersebut telah berubah menjadi SLF (Surat Laik Fungsi) yaitu seluruh bangunan yang berada di Pontianak dan Wilker PSDKP Ketapang. Untuk SLF

Kantor Wilker PSDKP Ketapang sampai dengan pelaporan telah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ketapang dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan SLF. Sedangkan untuk Kantor Pontianak batas tanah secara digital dari BPN tidak sesuai eksistengnya yang terbit di dalam sertifikat tanah Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, sehingga permasalahan tersebut sedang diajukan oleh Biro Hukum KKP ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

5. Sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI lingkup Ditjen PSDKP Nomor 1092/PSDKP.1/TU.210/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, yakni terkait temuan BPK RI atas LK KKP periode TA 2010 – 2021 yakni BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPB terkait supaya menginput bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, pada Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 65 NUP senilai Rp56.647.948.442 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 64 NUP senilai Rp56.587.948.422.
6. Aset yang telah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Dalam Proses Pengajuan (Rp)
1	Tanah	11.836.746.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	61.630.710.106	-	49.515.000
3	Gedung dan Bangunan	14.586.826.318	-	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.494.291.923	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
TOTAL		110.548.574.347	-	49.515.000

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam

sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2026 pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :